



SALINAN

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 4/KSP/VIII/2019  
NOMOR : 55/K/DPRD/2019  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta  
2. Nama : Arif Noor Hartanto  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta  
3. Nama : Rany Widayati  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta  
Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.



Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA

ttd

ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA

ttd

RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 4/KSP/VIII/2019  
NOMOR : 55/K/DPRD/2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	2
1.4 Sistematika .....	5
BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH .....	6
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah .....	6
2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi .....	6
2.1.2 Inflasi .....	10
2.1.3 Ketenagakerjaan .....	11
2.1.4 Kemiskinan .....	11
2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah .....	12
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	12
2.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2020.....	13
2.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.2.2 Proyeksi Inflasi .....	14
2.2.3 Proyeksi Ketenagakerjaan .....	15
2.2.4 Proyeksi Kemiskinan .....	16
2.2.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah.....	17
2.2.6 Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	18
BAB 3 ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2020.....	19
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN .....	19
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD .....	20
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	49
4.1 Pendapatan Daerah.....	49
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .....	49
4.1.2 Target Pendapatan Daerah.....	50
4.1.3 Strategi Pencapaian Target .....	55
4.2 Belanja Daerah .....	58
4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah.....	58
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.....	59
4.3 Pembiayaan Daerah .....	62
4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	62
4.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	63



4.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	63
BAB 5 PENUTUP.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), Tahun 2015-2019 .....	6
Gambar 2-2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015 - 2019 .....	7
Gambar 2-3 Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019 .....	7
Gambar 2-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019 .	9
Gambar 2-5 Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor (dalam persen) .....	10
Gambar 2-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019 .....	10
Gambar 2-7 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019 .....	12
Gambar 2-8 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 – 2019.....	13
Gambar 2-9 Grafik Prediksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2024 .....	13



## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2012-2018 (juta rupiah).....	8
Tabel 2-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2012-2018 (dalam persen) .....	8
Tabel 2-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019 ....	11
Tabel 2-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019 .....	11
Tabel 2-5	Hasil Peramalan PDRB Riil DIY (Berdasarkan harga konstan tahun 2010, dalam juta).....	14
Tabel 2-6	Hasil Peramalan Laju Inflasi (dalam persen).....	15
Tabel 2-7	Hasil Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)..	15
Tabel 2-8	Hasil Peramalan Tingkat Kemiskinan (%) .....	16
Tabel 2-9	Perhitungan Indeks Williamson tahun 2019-2020.....	17
Tabel 2-10	Hasil Peramalan Indeks Gini DIY Model Univariate dan VAR .....	18
Tabel 3-1	Program/Kegiatan Tematik untuk Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan .....	25
Tabel 3-2	Program/Kegiatan Tematik untuk Penurunan Ketimpangan wilayah.....	32
Tabel 3-3	Program/Kegiatan Tematik untuk Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) .....	45
Tabel 3-4	Program/Kegiatan Tematik untuk Tematik Pembiayaan Pembangunan.....	47
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2020 .....	54
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020 .....	64



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 (RKPD DIY Tahun 2020) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. RKPD DIY Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RPJMD DIY Tahun 2017-2022 merupakan irisan tahap ke-3 (2015-2019) dan tahap ke-4 (2020-2025) dari bagian proses RPJPD DIY, sehingga RKPD Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-3 (2015-2019) RPJPD DIY. RKPD DIY tahun 2020 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas.”***

Tema RKPD DIY mengambil aspek percepatan pembangunan dan peningkatan SDM sebagai pendukung pertumbuhan yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan berkualitas dapat dimaknai sebagai pertumbuhan yang merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut berangkat dari kondisi ketimpangan antar wilayah dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan yang masih menjadi isu tematik penting di DIY dalam periode RPJMD DIY 2017-2022.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2020 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Peraturan





Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2020 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2020, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020. KUA Tahun Anggaran 2020 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

## **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);



20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

#### **1.4 Sistematika**

Kebijakan Umum APBD DIY Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020.
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah  
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2017 dan tahun 2018 serta proyeksi tahun 2019-2020.
3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD  
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah,  
Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2020.
  - b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2020.
  - c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020.
5. Bab V Penutup.

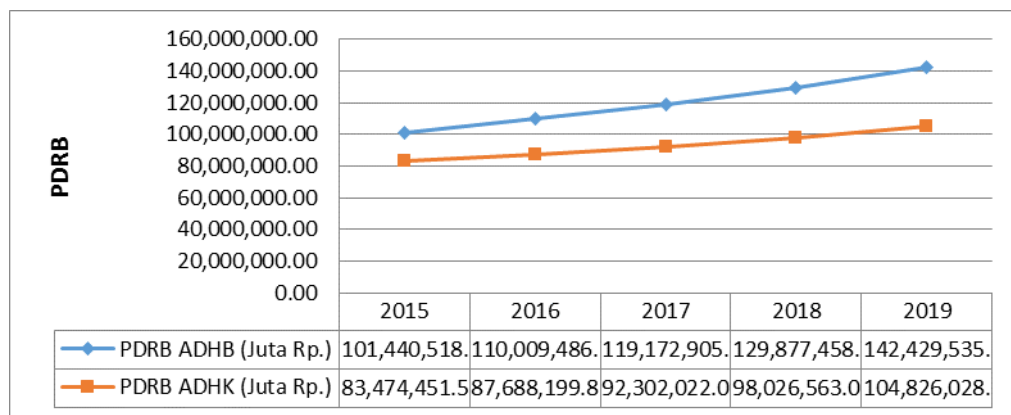


## BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH

### 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah

#### 2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,48 triliun rupiah meningkat menjadi 142,43 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan PDRB ADHK meningkat sebesar 21,35 triliun rupiah selama tahun 2015 – 2019.

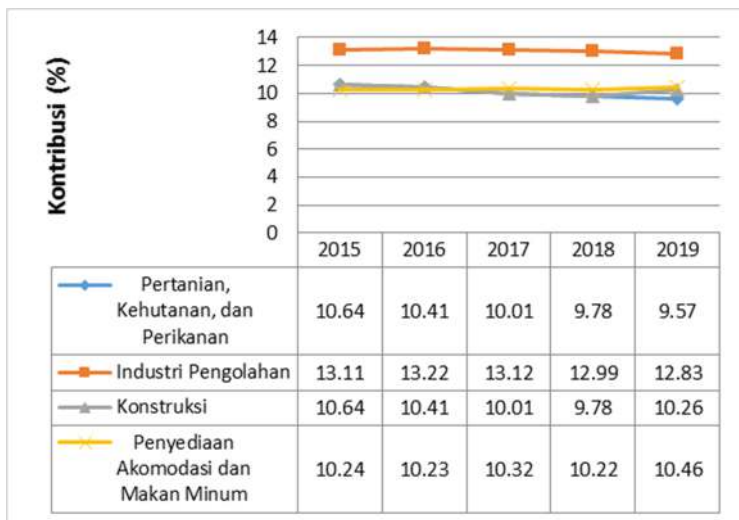


Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan : Angka tahun 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), Tahun 2015-2019**

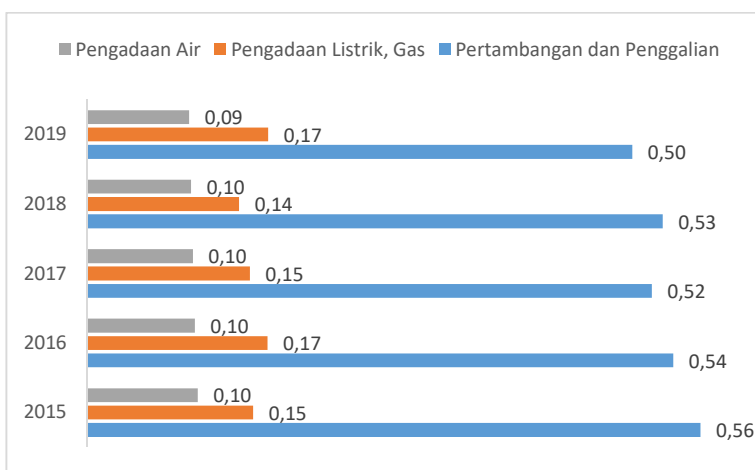
Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 12,83%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,46%, sektor konstruksi 10,26% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,57%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan  
 Keterangan : Angka tahun 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015 - 2019**

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan  
 Keterangan : Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-3 Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019**

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2014-2018, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari sebesar 62,875 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 86,753 triliun rupiah pada tahun 2018. Namun, porsi



nilai tersebut terhadap total nilai PDRB mengalami penurunan dari sebesar 67,72% pada tahun 2014 menjadi 66,80% pada tahun 2018.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Nilai PMTB pada tahun 2014 sebesar 27.745 triliun rupiah yang meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 43,174 triliun rupiah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2014 sebesar 15,347 triliun rupiah (16,53%) meningkat menjadi sebesar 21.346 triliun rupiah (16,44%) pada tahun 2018. Selama periode lima tahun tersebut, kontribusi konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dengan kecenderungan yang relatif datar, dan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Nilai ekspor luar negeri DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai 1,543 triliun rupiah. Pada periode 2014-2016, surplus perdagangan luar negeri menurun, namun meningkat.

**Tabel 2-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2012-2018 (juta rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi RT	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197
Konsumsi LNPRT	2.948.427	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046
Konsumsi pemerintah	15.347.428	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113
PMTB	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678
Perubahan Inventori	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491
Ekspor LN	5.465.423	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632
Impor LN	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068
Net Ekspor Antar daerah	- 18.433.682	-20.819.021	- 21.290.602	- 25.747.135	-28.469.631
<b>PDRB</b>	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906	129.877.458

Sumber : BPS Provinsi DIY

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2012-2018 (dalam persen)**

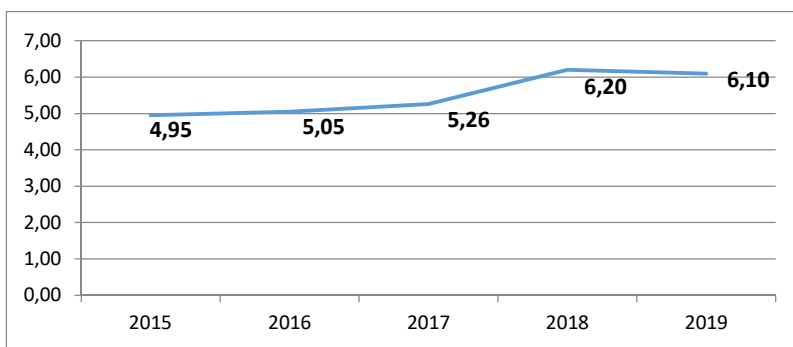
Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi RT	67,72	67,75	67,66	68,55	66,80
Konsumsi LNPRT	3,18	3,13	2,93	3,15	3,15
Konsumsi pemerintah	16,53	16,97	16,76	16,64	16,44
PMTB	29,88	30,36	30,39	31,17	33,24
Perubahan Inventori	1,06	1,14	1,18	1,15	1,11
Ekspor LN	5,89	6,18	5,9	6,24	6,74



Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
Impor LN	4,4	4,99	5,38	5,49	5,55
Net Ekspor Antar daerah	-19,85	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi DIY

Untuk pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.



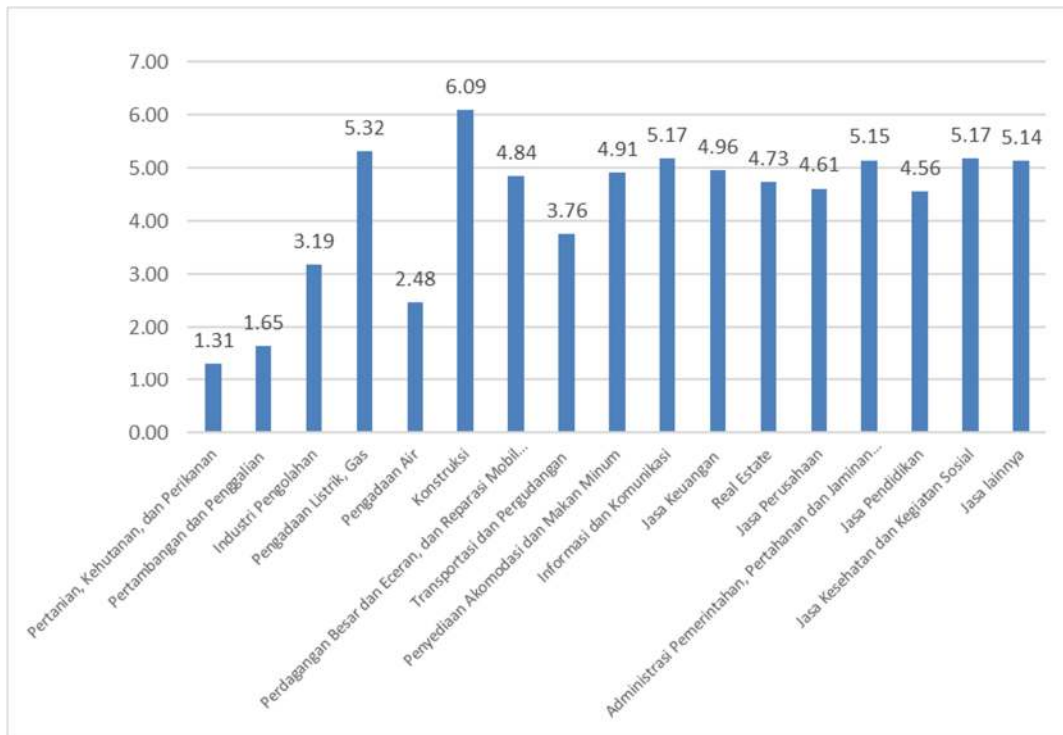
Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan : Angka tahun 2019 adalah proyeksi

#### **Gambar 2-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019**

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi termasuk penyelesaian Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA). Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun sebesar 0,10 poin menjadi 6,10%.



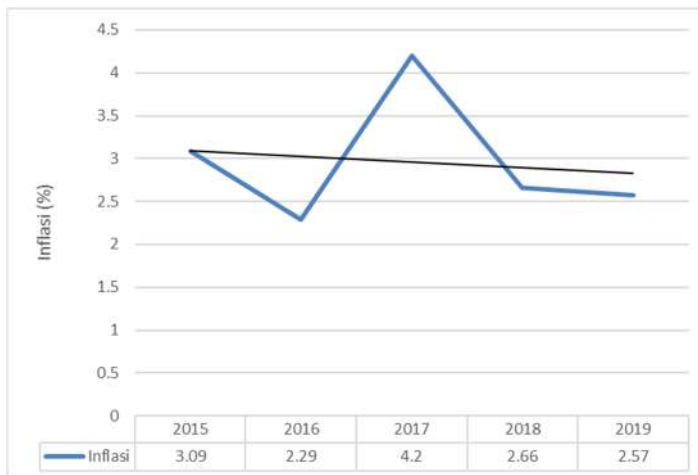


Sumber : Olahan

**Gambar 2-5 Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor (dalam persen)**

### 2.1.2 Inflasi

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2012-2016, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.29%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,57%.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Keterangan : Angka tahun 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019**



### 2.1.3 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan unsur Sumberdaya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam pembangunan selain memperhatikan kuantitas tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas.

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.117.190	2.191.740	2.252.361
Pengangguran Terbuka	48.664	57.036	64.020	73.350	75.229
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,43	2,71	3,02	3,35	3,34

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2017

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.252.361 orang dan meningkat sebanyak 60.620 orang dari 2.191.740 orang dari tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 75.229 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,56% dari tahun 2018.

### 2.1.4 Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 56,31 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar 22,5 ribu orang.

**Tabel 2-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	485.56	488.83	466.33	450.25	429.25
Tingkat Kemiskinan (%)	13.16	13.10	12.36	11.81	11.26

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2018 (September)

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

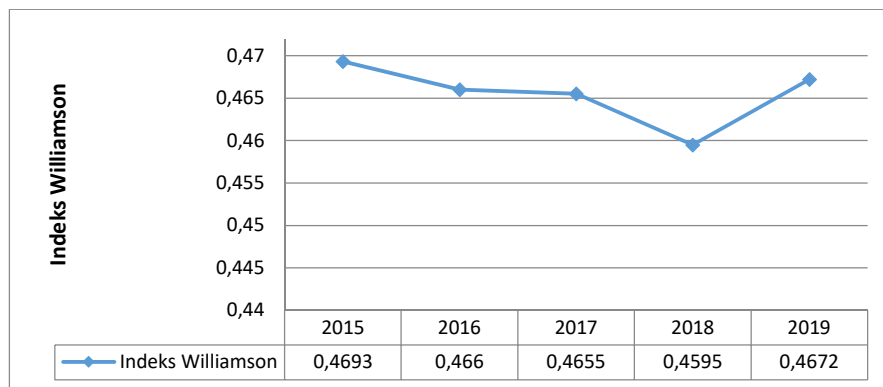
Persentase penduduk miskin mengalami kecenderungan menurun sampai dengan 2019. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang



hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun dari 13,16% di tahun 2015.

### 2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)*. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan angka IW-nya masih di bawah 0,6. Pada tahun 2015, nilai IW adalah 0,4693 yang menurun sampai tahun 2018 menjadi 0,4595. Angka IW selanjutnya meningkat di tahun 2019.



Sumber : Bappeda DIY, 2018

Keterangan : Angka 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-7 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019**

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

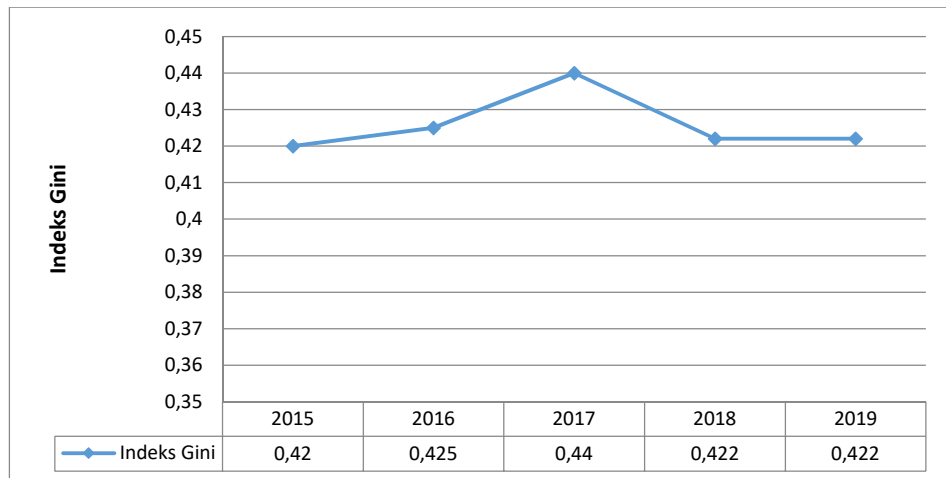
### 2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Gini/Rasio Gini. Perhitungan Rasio Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat



ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.



Sumber : Bappeda 2018

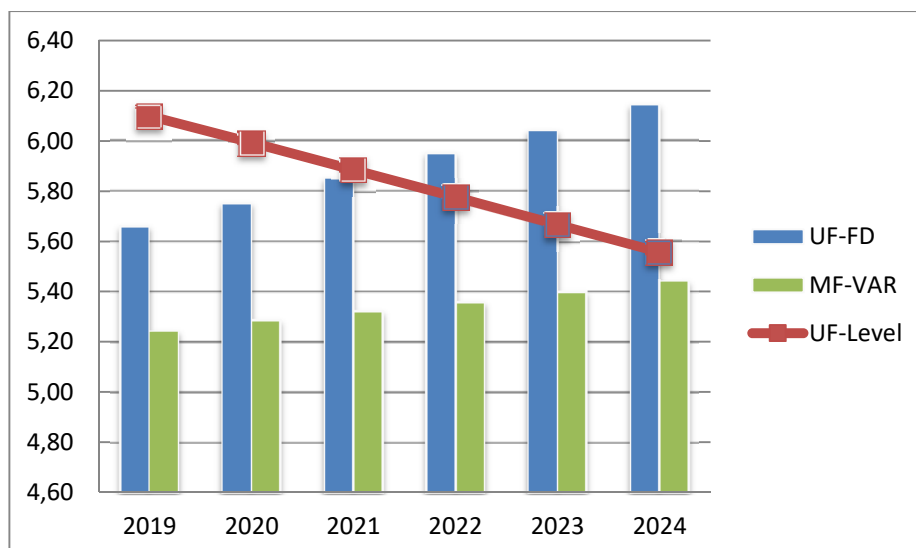
Keterangan : Angka 2019 adalah proyeksi

**Gambar 2-8 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 - 2019**

## 2.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2020

### 2.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tren laju pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan adanya tren kenaikan.



Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY

**Gambar 2-9 Grafik Prediksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2024**



Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 diperkirakan tumbuh sebesar 5,99 %. Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,20% yang didorong oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang didominasi oleh dampak pembangunan YIA dan beberapa proyek fisik besar, namun telah selesainya proyek-proyek tersebut di tahun 2019 menyebabkan peran pertumbuhan sektor konstruksi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diperkirakan turun dibanding tahun 2018 dan 2019. Pertumbuhan sebesar 5,99% di tahun 2020 menyebabkan nilai PDRB ADHK di tahun tersebut menjadi sebesar Rp. 110.237.702 juta.

**Tabel 2-5 Hasil Peramalan PDRB Riil DIY (Berdasarkan harga konstan tahun 2010, dalam juta)**

Tahun	<i>Lower Confidence Limit (LCL)</i>	<b>Prediksi (Arima 0,2,0)</b>	<i>Upper Confidence Limit (UCL)</i>
2019	103.183.905	104.004.967	104.826.028
2020	108.401.752	110.237.702	112.073.651

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY

Dengan hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, maka target yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DIY yang menyatakan bahwa tahun 2020 diharapkan pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,29 %, angka prediksi di atas menunjukkan optimisme untuk mencapainya.

### **2.2.2 Proyeksi Inflasi**

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama tiga tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja TPID yang baik tersebut akan mendorong tetap rendahnya tingkat kenaikan harga umum di DIY dan angka inflasi cenderung terus menurun sampai tahun 2020 menjadi sekitar 2,21.

Nilai inflasi perlu terus dikendalikan karena dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peramalan nilai inflasi di masa yang akan datang diperlukan dalam kebijakan pengendalian inflasi. Nilai dan hasil prediksi inflasi Provinsi DIY pada tahun mendatang ditampilkan dalam Tabel berikut ini.



**Tabel 2-6 Hasil Peramalan Laju Inflasi (dalam persen)**

Tahun	<i>Lower Confidence Limit (LCL)</i>	<b>Prediksi (Model Holt)</b>	<i>Upper Confidence Limit (UCL)</i>
2019	-3,12	2,65	8,43
2020	-3,57	2,21	7,99

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY,

Tabel diatas menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi DIY mengalami tren menurun. Penurunan inflasi ini tidak lepas dari intervensi kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan kebijakan *Inflation Targetting* (penargetan inflasi) , dan pembentukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di setiap daerah beserta program-program yang dilaksanakannya. Dengan demikian besarnya inflasi di daerah semakin terjaga pada tingkat yang ditargetkan.

### 2.2.3 Proyeksi Ketenagakerjaan

Terkait dengan ketenagakerjaan, hasil proyeksi jumlah pengangguran terbuka di Provinsi DIY dapat dilihat dalam Tabel 2.7. Dengan menggunakan data historis, ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi DIY pada tahun 2019 diperkirakan sebanyak 3,34 persen. Idealnya jumlah pengangguran diupayakan menjadi seminimal mungkin. Maka dari itu diperlukan kebijakan khusus yang dapat diupayakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi DIY. Tingkat pengangguran di masa mendatang yaitu 2019-2020 diramalkan akan terus mengalami penurunan secara gradual, dan pada tahun 2020 tingkat pengangguran di DIY diperkirakan mencapai 3,33 persen dari angkatan kerja. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetapi penurunan ini tidaklah signifikan. Dengan demikian diperlukan identifikasi terkait determinan pengangguran di Provinsi DIY sebagai bahan pengambil kebijakan dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

**Tabel 2-7 Hasil Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**

Tahun	<i>Lower Confidence Limit (LCL) Arima (010)</i>	<b>Prediksi ARIMA (0,1,0)</b>	<i>Upper Confidence Limit (UCL)</i>
2019	0,47	3,34	6,21
2020	-0,73	3,33	7,39

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY,.

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 sempat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020, tingkat



pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor terdampak oleh keberadaan dan operasionalisasi YIA. Semakin meningkatnya peluang kerja di tahun 2020 akan mendorong TPT turun menjadi 3,34 % dari sekitar 3,35 % di tahun sebelumnya.

#### 2.2.4 Proyeksi Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Dari data dan hasil peramalan tingkat kemiskinan di DIY dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di DIY dapat dikategorikan relatif cukup tinggi, yang mana tingkat kemiskinan di tahun 2019 diprediksi sebesar 11,26 persen. Idealnya besaran nilai tingkat kemiskinan adalah sekecil mungkin yang artinya tidak ada penduduk yang dikategorikan miskin. Maka dari itu untuk mengurangi tingkat kemiskinan perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan berdasarkan pada hasil prediksi tingkat kemiskinan di masa mendatang dengan kondisi *ceteris paribus*.

**Tabel 2-8 Hasil Peramalan Tingkat Kemiskinan (%)**

Tahun	Lower Confidence Limit (LCL)	Prediksi (Model Brown)	Upper Confidence Limit (UCL)	Target RPJMD
2019	8,04	11,26	14,48	10,19
2020	3,5	10,71	17,92	9,11

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa peramalan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Hal ini mempunyai makna bahwa, apabila pemerintah setiap tahunnya mempertahankan konsistensinya dalam usaha pengentasan kemiskinan maka angka kemiskinan akan berhasil diturunkan.

Hasil peramalan tersebut merupakan nilai optimal yang akan dicapai oleh DIY pada kondisi *ceteris paribus*. Target pemerintah DIY untuk angka kemiskinan tahun 2020 adalah sebesar 9,11. Jika dilihat dari nilai prediksi angka ini masih jauh di bawahnya. Dengan demikian perlu dilakukan penambahan program-program penanggulangan kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu program-program daerah yang selama ini sudah dilakukan secara kontinyu perlu dievaluasi efektifitasnya dan lebih ditingkatkan kembali baik



untuk kepala keluarga yang menjadi sasaran pemerintah ataupun keluarga yang dinilai layak menerima meskipun belum menjadi keluarga yang disasar pemerintah.

Keefektifan intervensi tersebut didukung juga oleh semangat untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran baik dalam bentuk inclusion and exclusion error. Kondisi-kondisi tersebut akan mendorong penurunan kemiskinan menjadi sekitar 10,71% di tahun 2020.

### 2.2.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator lain mengenai ketimpangan adalah Indeks Williamson yang mengukur besarnya ketimpangan antar daerah. Ketimpangan wilayah DIY yang diukur dengan Indeks Williamson, tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671 yang menurun dari 0,4672 pada tahun sebelumnya. Pengurangan ketimpangan wilayah didorong oleh dampak keberadaan dan operasionalisasi YIA yang dapat di manfaatkan oleh daerah lain untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Penurunan ketimpangan hanya sekitar 0,001 poin mengingat jangka waktu tahun bersangkutan belum panjang dibandingkan dengan mulai beroperasinya bandara baru. Unit-unit usaha yang tercipta belum menunjukkan kinerja yang memuaskan karena masih relatif baru. Belum berkembangnya unit usaha baru belum dapat mendorong multiplier effect lanjutan ke sektor lain maupun penyerapan tenaga kerja di daerah setempat sehingga belum dapat menunjukkan peningkatan pendapatan di daerah-daerah yang mulai berkembang.

**Tabel 2-9 Perhitungan Indeks Williamson tahun 2019-2020**

Tahun	UF	MF-VAR	Target RPJMD
2019	0,4684	0,4672	0,4552
2020	0,4684	0,4671	0,4524

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY.

Walaupun mengalami penurunan, nilai Indeks Williamson ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di DIY masih cukup tinggi. Maka diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar daerah di DIY untuk menekan tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah.

Angka prediksi ini masih jauh dari capaian yang tercatat dalam RPJMD, yaitu tahun 2020 ditargetkan indeks Williamsom sebesar 0,452. Kedua hasil proyeksi masih belum sesuai dengan target RPJMD. Salah satu faktor penyebab angka indeks Williamson di DIY sulit untuk turun adalah tingkat pendapatan Kabupaten Sleman yang





jauh melampaui kabupaten/kota lain yang ada di DIY. Dengan demikian perhatian kepada kabupaten lain terutama Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul perlu ditingkatkan.

### 2.2.6 Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga Pemerintah Provinsi DIY memiliki perhatian yang cukup besar terhadap tren peningkatan dari nilai indeks gini dari tahun ke tahun.

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 diperkirakan masih belum berubah selama dua tahun terakhir yaitu berkisar 0,422. Hal tersebut disebabkan oleh tetap lebih cepatnya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

**Tabel 2-10 Hasil Peramalan Indeks Gini DIY Model Univariate dan VAR**

Tahun	UF	MF-VAR	Target RPJMD
2019	0,422	0,437	0,3846
2020	0,422	0,441	0,3776

Sumber : Analisis Makro Ekonomi DIY 2019, Bappeda DIY

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena hasil prediksi yang ada menunjukkan penanganan penurunan angka ketimpangan ini harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan. Jika meninjau besarnya target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020 diharapkan angka indeks gini sebesar 0,3776. Angka ini jauh di bawah angka prediksi, perlu usaha yang keras untuk mencapai angka tersebut. Kedua hasil proyeksi yang ditunjukkan pada table 5.6 diatas masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMD.



## **BAB 3 ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2020**

### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (RKP 2020) merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah

#### ***“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.***

RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan, dengan indikator capaian pembangunan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi (%) diperkirakan dapat mencapai 5,3 - 5,6;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diperkirakan 4,8 - 5,1 persen;
3. Angka Kemiskinan (%) ditargetkan antara 8,5 - 9,0 persen;
4. Rasio Gini (Indeks) antara 0,375 - 0,380;

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, arah kebijakan pembangunan nasional yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2020 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan



seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2020 tema utama adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY), sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 terhadap indikator makro adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,29 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 2,42 persen;
3. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,11 persen; dan
4. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,3776.

### **3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD**

Tema pembangunan RKPD DIY 2020 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum dalam RKP 2020, dan memperhatikan fokus tematik. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut,

#### ***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”***

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:



## 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan menjadi pendorong pengurangan ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Selain itu, fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY mendorong fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya." Prioritas penyelesaian infrastruktur antara lain terkait Yogyakarta International Airport (YIA), JJLS, JATP dan infrastruktur pendukung terkait.

Percepatan pembangunan infrastruktur dimaknai secara luas tidak hanya terkait dengan sarana prasarana tetapi juga aspek non sarana prasarana fisik. Diharapkan kata kunci tema ini dapat berkontribusi dalam rangka pencapaian target sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yang akan diukur dengan indikator :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- c. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kata kunci tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2020 prioritas *Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan* yang berhubungan dengan prioritas RKP/ nasional dalam rangka *Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup* dan prioritas *Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja*.

## 2. Peningkatan SDM

Pada tahun 2018, perekonomian tumbuh melampaui target namun belum optimal mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan angka kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi DIY belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Indeks gini masih mencapai 0,441 dan Angka Kemiskinan 11,81% sementara itu IPM DIY melampaui rata-rata nasional. Ketimpangan juga terjadi pada capaian IPM yang masih timpang antar Kabupaten/Kota.



Kondisi tersebut memerlukan terobosan baru agar pembangunan daerah tidak hanya tumbuh, tetapi memperhatikan dimensi pemerataan dan meningkatkan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhineka-tunggal-ika-an* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sesuai misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022.

Keyword tema Peningkatan SDM sekurangnya dapat mendukung pencapaian 3 Sasaran RPJMD DIY pada tahun 2020 :

- a. *Meningkatnya Derajat kualitas SDM dengan indikator sasaran :*
  - 1) IPM dan
  - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. *Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator sasaran :*
  - 1) Indeks Gini
  - 2) Angka Kemiskinan
- c. *Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.*

Berdasarkan kata kunci tema dan penjelasan tersebut dirumuskan prioritas *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan* yang sinergis dengan prioritas nasional *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan*

### 3. *Pertumbuhan Berkualitas*

Pertumbuhan ekonomi di DIY yang dicapai 6,20 (2018, BPS) belum merata apabila melihat capaian Indeks Williamson 0,4599 yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,4559 (tercapai 99,12%). Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth-less pro poor* (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I).



Apabila didasarkan pada analisis *Shift Share* yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sektoral dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota dengan pertumbuhan pesat (kuadran III). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan.

Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan,

- a. Perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,
- c. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah,

Sesuai arahan Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendorong terjadinya pertumbuhan berkualitas yakni pertumbuhan yang inklusif dimana hasil pembangunan adalah pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (Bank Dunia). Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY



“Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson” diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan pada tahun 2020 yang dirumuskan terkait kata kunci ini ialah prioritas *Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah* yang berhubungan dengan prioritas RKP/ nasional *Penguatan Konektivitas dan Pemerataan*.

Ketiga Kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2020 dan diselaraskan dengan tema RKP 2020 dan Prioritas Nasional. Ketiga kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain :

- a. Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator sasaran
  - 1) Opini BPK
  - 2) Nilai Akuntabilitas Pemerintah
- b. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan dengan Indikator Persentase capaian program urusan keistimewaan
- c. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan, Kadipaten dan tanah desa dengan indikator Bidang tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Tema RKPD DIY 2020 merupakan sub tema dari tema RKP 2020 dengan tautan kata kunci “Pertumbuhan Berkualitas.” Kelima prioritas nasional yang tercantum dalam RKP 2020 selaras dengan pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020, yakni :

- a. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
- b. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
- c. Respon terhadap Pembangunan *Yogyakarta International Airport*
- d. Pembiayaan Pembangunan

Pemda DIY dalam rangka fokus tematik tersebut merencanakan pokok-pokok program/ kegiatan sebagai berikut,



## 1. Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan

Program/ kegiatan tematik untuk Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut,

**Tabel 3-1 Program/Kegiatan Tematik untuk Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan**

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa
2	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	KESEHATAN	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY	Kota Yogyakarta (20 Unit); Bantul (350 unit); Gunungkidul (200 unit); Kulon Progo ( 374 unit); Sleman (200 unit)
3	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	KESEHATAN	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS	Pelayanan Jaminan Kesehatan	02. Pelayanan Pembiayaan Klaim Jamkesta sesuai anggaran	100%
4	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	15 kelompok
5	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit
						Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit
6	2. Pembangunan Manusia dan	1.1.2. Meningkatnya Derajat	SOSIAL		Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang	10. Perlindungan Anak	245 org





No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengentasan Kemiskinan	Ekonomi Masyarakat		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Terlantar melalui LKSA 12. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org
7	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org
8	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang
						02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang
						03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang
						08. Bedah Kamar Lansia	50 orang
						10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi
9	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota
						3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)
						6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE
						7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE
10	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi	185 orang



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	
11	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan , Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang
12	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan , Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang
						2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang
13	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang
14	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan , pengasuhan Balita Terlantar	25 orang
						Perlindungan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak
						Perlindungan , Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Perlindungan , Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang
16	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1. Pembinaan Desa Prima	100 Desa
						2. Hibah Kelompok	15 Desa
17	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	PANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	Penanganan Desa Rawan Pangan	Desa Mandiri Pangan	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa
						Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan
18	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	3. 207 usaha/kegiatan
19	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	2. Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	25 Kelompok
						3. Gerakan Bersih Pantai	2 lokasi
20	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 kali : 2 hari
21	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Konservasi Sumber Daya Alam	3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	60 orang (2 angkatan)
22	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	500 akta



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pencatatan Sipil	Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	200 akta
						Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta
23	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	02. Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan
24	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Bakti sosial Pelayanan KB	10 lokasi
25	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM
26	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	STATISTIK	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	Penyediaan Data Statistik	4. Dokumen Analisis Kemiskinan Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan
27	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	1. Bedah buku 2. Forum Perpustakaan	1. 27 Bedah buku 2. 2 kali
28	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan baru produksi kelompok nelayan	15 orang 48 ton
29	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok
30	3. Aktivitas Perekonomian	1.1.4. Meningkatnya		PROGRAM PENGOLAHAN		jumlah orang yang	750 orang



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	yang Berkelanjutan	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Pengolahan Hasil Perikanan	memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	
						produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0,5 ton
31	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Pemasaran Hasil Perikanan	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	2600 orang
32	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton
33	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Budidaya Tanaman Pangan	sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	4 km
34	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	Budidaya peternakan	penambahan populasi ternak ayam buras	1.000 ekor
35	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)
36	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	2. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Penilaian Kinerja Ganis/Wasg anis (30 org x 1 angkt) - Penyegaran Ganis/Wasg anis (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang
37	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	2000 RT



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				KETENAGALIS TRIKAN	Ketenagalistrikan	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen (5000 RT)
38	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH	Pendayagunaan Air Tanah	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	1 unit dan 20 unit
						Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 unit dan 20 unit
39	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%
						Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5%
40	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pengembangan Ekonomi Perempuan	inisiasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	5 Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya
41	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020
						2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020
						3. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020
						4. Pengembangan Aplikasi	1 aplikasi



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	

## 2. Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

Program/ kegiatan tematik untuk Penurunan Ketimpangan Wilayah dapat disajikan sebagai berikut,

**Tabel 3-2 Program/Kegiatan Tematik untuk Penurunan Ketimpangan wilayah**

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGAAN RAAN JALAN	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM
						Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM
2	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 Km
						Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantai Congot	1.365 m2
3	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PRASARANA SANITASI	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m
						Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan	1 dokumen, 550 meter
4	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAA	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N AIR MINUM			
5	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN AIR BAKU	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo	1 embung
6	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBA NGAN DAN PENGELOLA AN SISTEM IRIGASI	Pengembangan Jaringan Irigasi	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen
						Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro	2000 m
						Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m
7	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 titik
8	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	2 lokasi
9	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	Tersusunnya Rekomendasi Dalam Rangka Penurunan Angka Kesenjangan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)
10	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/ Kota	1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibuntranmas dan linmas
11	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAG	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman	25 SPAB/SSB





No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Berkelanjutan	PERLINDUNGAN MASYARAKAT	AAN BENCANA		Bencana (SPAB)	
12	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	4 kali drill skil, 1 kali geladi "Tactical Floor Games" , 1 kali geladi Posko dan 1 kali Geladi Lapang
13	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	4 paket/80 orang
14	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang
15	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang
16	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Pemagangan Tenaga Kerja	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang
						Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	40 orang
						Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Caregiver	20 orang
17	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian Lingkungan Hidup	5. Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan	1 dokumen



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Berkelanjutan				Hidup (RPPLH) DIY	
						6. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY	1 dokumen
18	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026
						2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY
						3. Penanaman Vegetasi	50 Ha
19	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Konservasi Sumber Daya Alam	2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	20 Ha
20	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBAANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik
						Pengadaan suku cadang APILL	1 paket
						Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket
						Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi
						Teknisi APILL dan APJ (6 org x 312 hari)	1872 oh
21	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU	Layanan Usaha Wirausaha Baru	Akses promosi dan pemasaran UKM mitra PLUT	50 UKM
						Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub
						Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM
						Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM
23	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkatkan kapasitas usahanya 100%	120 kop
						Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkatkan Kapasitasnya 100%	30 orang
24	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	Pemasaran Perkoperasian	Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000
25	3. Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas	KOPERASI USAHA		Pelatihan Kelembagaan	Jumlah peserta pelatihan	60 UKM



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	Perekonomian yang Berkelanjutan	KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	n dan Usaha UKM	(terkait produk) yang meningkatkan ketrampilannya	
						Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkatkan pengetahuannya (ISO, HACCP, HAKI, MERK)	120 UKM
						Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi halal 25 produk, PIRT	10 Produk
						Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkatkan kapasitasnya	60 UKM
26	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Pemasaran Produk UKM	Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM
						Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak
						Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM
						Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%
27	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi
28	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAN	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM
						jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	150 UKM
29	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	Promosi Investasi	Temu Investor	Temu investor dengan mengundang 30 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 500.000.000.000,-
30	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	Penyiapan Potensi Investasi	Potensi investasi yang siap jual di kabupaten Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000
31	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	STATISTIK	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	Penyediaan Data Statistik	5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah
32	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton
33	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Girimulyo (Jatimulyo),	2 obyek / desa wisata



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten Kulon Progo, [2]Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	
						3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Daya Tarik Wisata Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,[3] Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, [4] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo, [5] di Kecamatan Semanu (Telaga Jonge - Pacarejo), Kabupaten Gunungkidul, [6] Sriten-Kecamatan Nglipar (Pilangrejo), Kabupaten Gunungkidul.	6 lokasi obyek wisata/desa wisata
34	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Budidaya Tanaman Pangan	sarana pertanian yang dapat dipenuhi	36 unit
35	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	Budidaya Tanaman Hortikultura	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	176 ha
36	3. Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian	KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	1. Pengendalian penatausahaan	21 unit usaha



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	n yang Berkelanjutan		KEHUTANA N		an hasil hutan	
37	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANA N	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANA N	Pengelolaan Perhutanan Sosial	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR
						2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	20 kelompok HR
38	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANA N	PROGRAM PENGELOLAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)	1 Dokumen
						3. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	24 RPH
						5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	411.600 batang
39	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANA N	PROGRAM PENGELOLAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	(minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)
40	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KEHUTANA N	PROGRAM PENGELOLAN HUTAN KONSERVASI	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder	12 bulan
						5. papan nama pohon	60 buah
41	3. Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang	PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBA	Pelatihan dan Kemitraan Ekspertir	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendamping	123 orang



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	Berkelanjutan		NGAN EKSPOR		an IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkatkan kapasitasnya 82%	
						Jumlah peserta pelatihan Eksporir baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkatkan kemampuannya 82%	160 orang
42	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkatkan kamampuannya 80%	160 Orang
						Peningkatan omset peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.037 Juta Menjadi Rp. 1.187 Juta	Rp. 150 juta
43	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 280 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkatkan kamampuannya 80%	224 Orang
44	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, WUB IKM Kayu,	208 Orang





No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						WUB IKM Bambu, Olahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, WUB IKM Bambu), Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahan Coklat) dari 320 Orang yang meningkatkan keterampilannya sebesar 65%	
						Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Girimulyo (Mebel Bambu), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, WUB Kayu, Olahan Pangan, Olahan Kopi) dari 200 Orang yang meningkatkan keterampilannya sebesar 65%	130 Orang
45	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kemitraan IKM Agro	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM
						Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta
46	3. Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI	Pelatihan Industri Kecil Menengah	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan	91 Orang



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	yang Berkelanjutan		KECIL DAN MENENGAH	Logam, Sandang dan Aneka	IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 160 Orang yang meningkatkan keterampilannya sebesar 65%	
47	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah IKM peserta temu kmitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM
						Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan Rumah Tangga, Fashion dan Aneka semula Rp. 600 Juta menjadi Rp. 1.050 Juta )	Rp. 450 Juta
48	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Pembentukan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur	3 lokasi
						Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang
49	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Penyelenggaraan Transmigrasi	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK
50	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	20 orang



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N TRANSMIGR AN			
51	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III	Pembangunan Fisik Taman Budaya di Gunungkidul
52	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEW AAN URUSAN KEBUDAYAA N	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	"BTI : Gamelan Perunggu" "KP : Gamelan, alat kesenian dan pakaian" "SLM : 1. Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Masyarakat seni dan Budaya"	1 set 15 kelompok 45 Kelompok seni
53	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	1. pendampingan desa budaya	5 aspek
54	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	BTI : 10 Rintisan Desa Budaya Workshop Perfilman" GK: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 2. Pembuatan Film Dokumenter Rintisan Desa Budaya (baru mulai 2020) KP : 1. Pembinaan desa rintisan budaya 2. Potensi rintisan desa Budaya 3. Sarpras " SLM : 1. Peningkatan SDM rintisan desa Budaya	10 desa 20 even (20 desa Rintisan Budaya) 2. 20 Desa Rintisan Budaya ( 20 Film)" 3 even (11 desa) 21 even (11 desa) 11 Desa " 38 desa



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(RDB) 2. Sarpras 3. Gelar Potensi "	

### 3. Program/Kegiatan Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Program/ kegiatan tematik untuk Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) dapat disajikan sebagai berikut,

**Tabel 3-3 Program/Kegiatan Tematik untuk Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)**

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	KESEHATAN	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	BKK tahap III RSUD Wates	100%
2	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung
3	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN BENCANA	Pengelolaan Pencegahan Bencana	(1). Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	(1). 25 Desa/Kelurahan
4	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	TENAGA KERJA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Pelatihan Aviation security Pelatihan Ground Staff	20 orang 20 orang
5	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBAANGAN KESELAMATAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas	Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Antar Wilayah		TRANSPORT ASI	Keselamatan Jalan		
6	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBA NGAN KESELAMAT AN TRANSPORT ASI	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Kawasan Bandara Baru	1 kali @100 peserta
7	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANAN ANGKUTAN	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen
8	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBA NGAN MANAJEME N DAN REKAYASA LALU LINTAS	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Brosot, Kab. Kulonprogo	1 unit
9	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKAT AN SDM DAN KELEMBAGA AN PARIWISATA	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang
10	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBA NGAN DESTINASI PARIWISATA	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event
						2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event
11	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	2. Kulonprogo manekowarno	2. 1 Even
						3. Art For Children KP	3. 5 kesenian
						4. Pembebasan Lahan KP	4. 4,2 ha
12	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	KEBUDAYAA N (KEISTIMEW AAN)	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Gelar Budaya Jogja	KP : 1. Pembinaan Ketoprak (workshop, Festival, audisi, pengiriman di tingkat DIY) 2. Pembinaan Langen carita ( Festival Langencarita	'1. 1 event 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event



No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						, Pengiriman Kontingen langencarita) 3. Pengiriman festival dalang 4. Pembinaan Langensworo (workshop, festival Langensworo ) 5. Sendratari sugriwo subali 6. Menoreh Art Festival 7. Pengiriman Festival Sendratari 8. Pembinaan Theater	
13	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan

#### 4. Program/ Kegiatan Tematik Pembiayaan Pembangunan.

Program/ kegiatan tematik untuk Tematik Pembiayaan Pembangunan dapat disajikan sebagai berikut,

**Tabel 3-4 Program/Kegiatan Tematik untuk Tematik Pembiayaan Pembangunan**

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KEUANGAN	PROGRAM PENDAYAGU NAKAN BARANG MILIK DAERAH	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan )	10 obyek
2	4. Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas	KEUANGAN	PROGRAM PENDAYAGU NAKAN BARANG	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)	1 laporan hasil kajian HBU



	Pembangunan	Tata Kelola Pemerintahan		MILIK DAERAH		BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	
						Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	6 Dokumen laporan penilaian BMD

Dengan kebijakan yang diarahkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan SDM sebagai pendukung pertumbuhan yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan berkualitas dapat dimaknai sebagai pertumbuhan yang merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan ditopang dengan asumsi kondisi regional DIY, maka diperoleh asumsi dalam RAPBD DIY tahun 2020 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,99 persen;
2. Tingkat Inflasi berkisar pada angka 2,21 persen;



## **BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

#### **4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2019 adalah:





- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
  - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas sistem *on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
  - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
  - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
  - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*.
  - f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

#### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah**

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp. 5,663 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 4,464 Trilyun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.1,198 Trilyun atau minus 21,17 persen.



Pendapatan Daerah DIY tahun 2020 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2,106 Trilyun.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,348 Trilyun.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 9,633 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

#### **4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2020 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 2,106 Trilyun, apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 1,921 Trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp. 185,385 Milyar atau sebesar 9,65 persen. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan



Kekayaan Daerah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

#### **4.1.2.1.1 Pajak Daerah**

Pada tahun anggaran 2020, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,872 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 1,720 Trilyun, Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 152,066 Milyar atau 8,84 persen.

#### **4.1.2.1.2 Retribusi Daerah**

Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 39,906 Milyar, naik sebesar Rp. 6,618 Milyar atau 19.88 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp. 33,288 Milyar.

#### **4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 99,880 Milyar, naik sebesar Rp 14,005 Milyar atau 16,31 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp. 85,874 Milyar.

#### **4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 95,060 Milyar, naik sebesar Rp. 12,694 Milyar atau 15.41 persen dari anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 82,365 Milyar.

#### **4.1.2.2 Dana Perimbangan**

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH Pajak/Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan Dana Bagi Hasil Cukai. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.



Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2,348 Trilyun apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2,474 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp 125,766 Milyar atau -5.08 persen.

#### **4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 103,244 Milyar, naik sebesar Rp 13,690 Milyar atau 15,29 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 89,553 Milyar.

#### **4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1,365 Trilyun atau naik sebesar Rp. 14,127 Milyar atau sebesar 1,05 % dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1,351 Trilyun.

#### **4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 879,920 Milyar, turun sebesar Rp. 153,584 Milyar atau -14,86 persen dari yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1,033 Trilyun.

#### **4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 9,633 Milyar, turun sebesar Rp. 1,258 Trilyun atau -99,24 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,268 Trilyun. Penurunan ini disebabkan karena Dana Keistimewaan Tahun 2020 belum ditentukan alokasinya oleh Pemerintah Pusat.

##### **4.1.2.3.1 Hibah**

Hibah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 8,853 Milyar atau mengalami kenaikan 338,400 Juta atau 3,97 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp. 8,515 Milyar.



#### 4.1.2.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,258 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0 mengingat bahwa Peraturan Presiden terhadap APBN 2020 belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

**Tabel 4.1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2020**

NO.	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (N)	SELISIH)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5,663,778,510,743.20</b>	<b>4,464,978,099,723.38</b>	<b>-1,198,800,411,019.82</b>	<b>-21.17%</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1,921,564,734,133.20</b>	<b>2,106,950,081,220.18</b>	<b>185,385,347,086.98</b>	<b>9.65%</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	1,720,036,541,180.35	1,872,103,160,000.00	<b>152,066,618,819.65</b>	<b>8.84%</b>
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	33,288,220,925.00	39,906,473,350.01	<b>6,618,252,425.01</b>	<b>19.88%</b>
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	85,874,687,657.66	99,880,255,777.75	<b>14,005,568,120.09</b>	<b>16.31%</b>
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	82,365,284,370.19	95,060,192,092.42	<b>12,694,907,722.23</b>	<b>15.41%</b>
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2,474,160,842,300.00</b>	<b>2,348,394,499,313.20</b>	<b>-125,766,342,986.80</b>	<b>-5.08%</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	89,553,564,300.00	103,244,089,600.00	<b>13,690,525,300.00</b>	<b>15.29%</b>
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1,351,102,020,000.00	1,365,229,514,955.60	<b>14,127,494,955.60</b>	<b>1.05%</b>
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	1,033,505,258,000.00	879,920,894,757.60	<b>-153,584,363,242.40</b>	<b>-14.86%</b>
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,268,052,934,310.00</b>	<b>9,633,519,190.00</b>	<b>-1,258,419,415,120.00</b>	<b>-99.24%</b>
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	8,515,100,000.00	8,853,500,000.00	<b>338,400,000.00</b>	<b>3.97%</b>
1.3.2	DANA DARURAT	0	0	<b>0.00</b>	
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	0	<b>0.00</b>	
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	1,258,831,799,000.00	0.00	<b>-1,258,831,799,000.00</b>	<b>-100%</b>
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	706,035,310.00	780,019,190.00	<b>73,983,880.00</b>	<b>10.48%</b>



NO.	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (N)	SELISIH)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	5,663,778,510,743.20	4,464,978,099,723.38	-1,198,800,411,019.82	-21.17%

### 4.1.3 Strategi Pencapaian Target

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan penggunaan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.



Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;



- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS *online* berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah





- 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan konfirmasi status Wajib Pajak

## **2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## **4.2 Belanja Daerah**

### **4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,



peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

##### **4.2.2.1 Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan



pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.



#### **4.2.2.2 Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

##### **b. Prioritas**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2020 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.



c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### **4.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah,



dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

#### **4.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp. 540,422 Milyar.

#### **4.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2020 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 238,540 Milyar.



**Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (N)	TAMBAH/(KURANG) (4-3)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5,663,778,510,743.20</b>	<b>4,464,978,099,723.38</b>	<b>-1,198,800,411,019.82</b>	<b>-21.17%</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1,921,564,734,133.20</b>	<b>2,106,950,081,220.18</b>	<b>185,385,347,086.98</b>	<b>9.65%</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	1,720,036,541,180.35	1,872,103,160,000.00	152,066,618,819.65	8.84%
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	33,288,220,925.00	39,906,473,350.01	6,618,252,425.01	19.88%
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	85,874,687,657.66	99,880,255,777.75	14,005,568,120.09	16.31%
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	82,365,284,370.19	95,060,192,092.42	12,694,907,722.23	15.41%
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2,474,160,842,300.00</b>	<b>2,348,394,499,313.20</b>	<b>-125,766,342,986.80</b>	<b>-5.08%</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	89,553,564,300.00	103,244,089,600.00	13,690,525,300.00	15.29%
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1,351,102,020,000.00	1,365,229,514,955.60	14,127,494,955.60	1.05%
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	1,033,505,258,000.00	879,920,894,757.60	-153,584,363,242.40	-14.86%
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,268,052,934,310.00</b>	<b>9,633,519,190.00</b>	<b>-1,258,419,415,120.00</b>	<b>-99.24%</b>
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	8,515,100,000.00	8,853,500,000.00	338,400,000.00	3.97%
1.3.2	DANA DARURAT	0	0	0.00	
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	0	0.00	
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	1,258,831,799,000.00	0.00	-1,258,831,799,000.00	-100%
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	706,035,310.00	780,019,190.00	73,983,880.00	10.48%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5,663,778,510,743.20</b>	<b>4,464,978,099,723.37</b>	<b>-1,198,800,411,019.82</b>	<b>-21.17%</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5,968,673,012,642.25</b>	<b>4,771,362,204,048.00</b>	<b>-1,197,310,808,594.25</b>	<b>-20.06%</b>



NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (N)	TAMBAH/(KURANG) (4-3)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,186,737,950,794.45</b>	<b>2,484,714,879,373.00</b>	<b>-702,023,071,421.45</b>	<b>-22.03%</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,416,494,422,321.00	1,694,127,503,373.00	277,633,081,052.00	19.60%
2.1.2	BELANJA BUNGA	0	0	0.00	
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	81,100,523,951.00	0	-81,100,523,951.00	-100%
2.1.4	BELANJA HIBAH	671,906,016,500.00	21,310,200,000.00	-650,595,816,500.00	-96.83%
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,402,000,000.00	1,000,000,000.00	-402,000,000.00	-28.67%
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	704,917,367,626.25	758,277,176,000.00	53,359,808,373.75	7.57%
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMDES	288,285,076,440.00	0.00	-288,285,076,440.00	-100%
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,632,543,956.20	10,000,000,000.00	-12,632,543,956.20	-55.82%
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,781,935,061,847.80</b>	<b>2,286,647,324,675.00</b>	<b>-495,287,737,172.80</b>	<b>-17.80%</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,968,673,012,642.25</b>	<b>4,771,362,204,048.00</b>	<b>-1,197,310,808,594.25</b>	<b>-20.06%</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>-304,894,501,899.05</b>	<b>-306,384,104,324.63</b>	<b>-1,489,602,425.57</b>	<b>0.49%</b>
		<b>-5.38%</b>	<b>-6.86%</b>	<b>-1.48%</b>	<b>27.47%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>304,894,501,899.05</b>	<b>306,384,104,324.63</b>	<b>1,489,602,425.58</b>	<b>0.49%</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>485,334,501,899.05</b>	<b>544,924,104,324.63</b>	<b>59,589,602,425.58</b>	<b>12.28%</b>
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	485,334,501,899.05	540,422,144,024.63	55,087,642,125.58	11.35%
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	0	0.00	
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0	0	0.00	
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0.00	
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0	0	0.00	
3.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0	0	0.00	





<b>NOMOR URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020 (N)</b>	<b>TAMBAH/(KURANG) (4-3)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3.1.7	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	0	4,501,960,300.00	<b>4,501,960,300.00</b>	
3.1.8	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0	0	<b>0.00</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>485,334,501,899.05</b>	<b>544,924,104,324.63</b>	<b>59,589,602,425.58</b>	<b>12.28%</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>180,440,000,000.00</b>	<b>238,540,000,000.00</b>	<b>58,100,000,000.00</b>	<b>32.20%</b>
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0	0	0.00	
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH)	180,440,000,000.00	238,540,000,000.00	58,100,000,000.00	32.20%
3.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0	0	0.00	
3.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0.00	
3.2.5	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0	0	0.00	
3.2.6	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM TERSELESAIKAN	0	0	0.00	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>180,440,000,000.00</b>	<b>238,540,000,000.00</b>	<b>58,100,000,000.00</b>	<b>32.20%</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>304,894,501,899.05</b>	<b>306,384,104,324.63</b>	<b>1,489,602,425.58</b>	<b>0.49%</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## BAB 5 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK PERTAMA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK KEDUA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA

ttd

ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA


ttd

RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007